



Tak Mau Sebut Nama

- Kepala BPKAD Pekanbaru Ungkap Ada 54 Penerima Bansos Beasiswa 2013
- Sudah Jadi Temuan Badan Pemeriksa Keuangan
- Sondia: Satker Malas-malasan saat Wako Tak Ada



” Sanksi administrasi sudah diberikan dalam bentuk teguran dan perintah pengembalian. Pengembalian harus dilakukan dalam tahun ini ”

BUSTAMI HY
Kepala BPKAD Pekanbaru

PEKANBARU, TRIBUN - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Pekanbaru, Bustami HY, Senin (13/10), mengungkap ada 54 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima beasiswa dari Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2013. Ia memastikan 54 orang tersebut sudah diminta mengembalikan dana yang telah mereka terima.

"Sanksi administrasi sudah diberikan dalam bentuk teguran dan perintah pengembalian. Pengembalian harus dilakukan dalam tahun ini," ungkap, Bustami HY.

Diterangkan Bustami, dari 54 orang tersebut, 26 orang di antaranya adalah penerima beasiswa untuk kategori S1 dengan jumlah Rp 7 juta per orang. Lalu 18 orang untuk kategori S2 dengan nilai beasiswa Rp 10 juta per orang. Selain itu, ada 10 orang pegawai negeri penerima beasiswa untuk jenjang S3 dengan nilai Rp 15 juta.

Namun, dia enggan menyebut nama-nama penerima beasiswa tersebut. Bustami kuatir, jika nama mereka disebutkan, Pemko akan tak efektif mengupayakan pengembalian dana. Begitu juga ketika Tribun bertanya apakah ada

pejabat eselon yang jadi penerima, Bustami enggan menjawab.

Meski demikian, dia memastikan semuanya sudah disurati sebagai tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam surat yang diserahkan pada akhir bulan September lalu itu mereka diminta mengembalikan beasiswa itu dalam tahun ini.

Menurut Bustami, para penerima beasiswa tersebut harus bersedia mengembalikan dana yang mereka terima. Karena penyaluran beasiswa itu sudah menjadi temuan BPK.

"Kalau tidak dikembalikan tahun ini, maka prosesnya naik ke tahap penuntutan oleh Tim Penuntutan Ganti Rugi (TPGR). Tim tersebut terdiri dari Sekdako (ketua), Inspektorat (wakil ketua) dan unsur inspektorat (sekretaris). Tim itu dibentuk untuk menuntaskan semua rekomendasi BPK yang tidak selesai pada periode penyelesaian 2014. Termasuk masalah beasiswa untuk PNS itu," ujar Bustami.

Ditambahkan Bustami, tak hanya penerima beasiswa yang mendapat sanksi. Pejabat terkait di bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan bendaha-

rawan BPKAD juga mendapat teguran. "Maksudnya agar tak terulang kembali," kata Bustami.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, BPKAD meminta agar PNS yang mendapat beasiswa pendidikan lewat bantuan sosial (Bansos) hibah tahun 2013 mengembalikan dana yang sudah mereka terima. Pasalnya, penyaluran beasiswa itu menjadi temuan BPK dan direkomendasikan agar dikembalikan.

Lebih lanjut Bustami HY menegaskan tak ada larangan bagi PNS mendapat beasiswa dari anggaran daerah. Hanya saja, penyalurannya tidak boleh dalam bentuk Bansos hibah.

"Sebenarnya boleh PNS menerima beasiswa. Tapi tidak di Bansos," ujarnya ketika ditanyai Tribun, Senin (13/10). Menurutnya, beasiswa dapat dianggarkan lewat mata anggaran lain. Misalnya anggaran pendidikan aparatur.

Dijelaskan Bustami, waktu penganggarkan beberapa waktu lalu, aturan masih memperbolehkan beasiswa bai PNS disalurkan dengan Bansos hibah. Tapi setelah dianggarkan, keluar Permendagri

■ Bersambung ke Hal 23



Tak Mau

Sambungan Hal. 13

nomor 39 tahun 2012 tentang bantuan sosial. Dimana diatur bahwa Bansos tidak boleh untuk beasiswa.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pekanbaru memastikan memberi masukan tak bolehnya Pemerintah Kota (Pemko) menyalurkan beasiswa dalam bentuk bantuan sosial (Bansos) hibah kepada pegawai negeri sipil (PNS). BPKP mengisyaratkan Inspektorat Pekanbaru bisa mengaudit jika beasiswa sudah terlanjur disalurkan.

Menurut Kepala BPKP Pekanbaru, Pangijo, Jumat (10/10), beberapa waktu lalu Pemko memang pernah menyurati pihaknya untuk meminta masukan terkait penyaluran beasiswa. Atas permintaan itu, BPKP memberi masukan bahwa penyaluran beasiswa yang diterapkan Pemko tidak tepat. Karena disalurkan dalam bentuk Bansos hibah.

Malas-malasan

Sementara itu, anggota DPRD Kota Pekanbaru Sondia Warman mengungkap adanya pegawai di sikap satuan kerja di Pemko Pekanbaru malas-malasan bekerja saat walikota tidak berada di Pekanbaru.

"Pimpinan DPRD segera laporkan ke Walikota tentang kondisi ini. Saat Walikota tak di kantor, Satker malas-malasan seperti ini," ungkap Sondia.

Sondia Warman menyampaikan hal ini, karena banyak Satker yang tak hadir dalam paripurna di DPRD Pekanbaru kemarin. Para kepala dinas banyak diwakili oleh stafnya. Padahal paripurna ini harusnya diketahui oleh Satker secara baik. Tentunya hal ini menjadi preseden buruk ke depannya.

Apalagi masih banyak program yang belum terealisasi hingga Oktober ini. Menurut politisi PAN ini, kondisi tersebut harus diubah dan tidak boleh berlarut-larut. Termasuk Camat dan Lurah yang jarang di kantor, saat masyarakat

berurusan.

Meski bisa dikerjakan para staf, namun untuk masalah administrasi perlu tanda tangan Camat atau Lurah tersebut. Dia menyebutkan, pola kerja seperti ini harus dievaluasi secara menyeluruh. Pihak dewan sendiri, akan memanggil para Satker ini, agar bisa bekerja secara maksimal.

"Setelah alat kelengkapan terbentuk, mereka sudah pasti kita panggil. Kenapa bisa seperti itu cara kerjanya," sebut Sondia Warman.

Ya, beberapa pekan terakhir masyarakat banyak mengeluhkan kondisi pelayanan di Pekanbaru. Terutama di beberapa Satker yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kondisi ini diharapkan, tidak terjadi lagi ke depannya. Pihak DPRD Pekanbaru dengan personil banyak yang baru, bisa membantu masyarakat, agar para kepala dinas, Camat dan Lurah bisa mengubah pola kerjanya. (hes/saf)